



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Identifikasi Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Pemula pada Pemilu sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Bangsa

Erna Febriani¹, Cornelius Ludi²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk, Jakarta – Indonesia

¹erna.febriani@esaunggul.ac.id

Abstract

The aim of this research is identify the forms and types of political participation as well as the influence of sociological, psychological and rational choices on the behavior of new voters in West Jakarta in determining their political choices. This study uses a quantitative method with a survey approach and takes a sample 500 new voters using cluster sampling technique. The data analysis technique in this study using multiple linear analysis, by looking for the influence of sociological (X1), sociological (X2) and rational choice factors (X3) on voting behavior (Y). The results showed that sociological (X1), psychological f (X2) and rational choices (X3) simultaneously affect the voting behavior (Y) of new voters. Partially, the factor that influence the voting behavior of new voters is rational choices, while sociological and psychological factors do not have a significant effect on voting behavior.

Keywords: Political participation, Voters behaviour, Beginner voters, General election,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan jenis partisipasi politik serta pengaruh faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional terhadap perilaku pemilih pemula di wilayah Jakarta Barat dalam menentukan pilihan politiknya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan mengambil sampel sebanyak 500 pemilih pemula yang berada di wilayah penelitian yang ditentukan dengan menggunakan teknik cluster sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda, dengan mencari pengaruh faktor sosiologis (X1), faktor sosiologis (X2) dan faktor pilihan rasional (X3) terhadap perilaku memilih (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosiologis (X1), faktor psikologis (X2) dan pilihan rasional (X3) berpengaruh secara simultan terhadap perilaku memilih (Y) pemilih pemula. Secara parsial, faktor yang berpengaruh terhadap perilaku memilih pemilih pemula adalah pilihan rasional, sedangkan faktor sosiologis dan psikologis tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih pemilih pemula.

Kata kunci: partisipasi politik, perilaku memilih, pemilih pemula, pemilihan umum, pendidikan politik.

Copyright © 2018 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. All rights reserved

Pendahuluan

Konsep daya saing sangat berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian suatu bangsa dan cenderung dipahami dengan menggunakan kerangka pikir ekonomik. Namun, daya saing suatu bangsa yang cenderung diidentikkan

dengan aktivitas perekonomian dapat juga didukung dengan menggunakan pendekatan politik. Partisipasi politik yang visioner dari masyarakat dapat menentukan arah perjalanan bangsa, keterlibatan masyarakat terhadap politik juga dapat membantu negara demokrasi

menjalankan suatu sistem negara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan kebijakan umum (Budiardjo, 2016). Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat (Budiardjo, 2016).

Partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan kesadaran menggunakan hak suara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disini, perilaku pemilih dalam menggunakan hak suara diharapkan dapat bersifat rasional dan mampu melahirkan aktor-aktor politik yang handal sehingga para aktor politik itu mampu melahirkan keputusan-keputusan politik yang strategis untuk membantu negara bersaing di dunia internasional. Pada negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik, sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai pertanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian pada masalah kenegaraan (Budiardjo, 2016). Sehingga, pemerintah harus senantiasa mencermati bagaimana warga negaranya dalam menggunakan hak pilih untuk dapat mewujudkan negara yang demokratis secara menyeluruh tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik secara nasional, namun juga terhadap dinamika kehidupan lain yang menunjang kehidupan kenegaraan dan daya saing terhadap bangsa lain.

Seperti yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya bahwa kesuksesan

pemyelenggaraan negara demokrasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya pemilih muda yang memiliki jumlah yang signifikan dalam menentukan arah politik suatu negara. Menurut data dari KPU Jakarta Selatan pada pemilihan Gubernur tahun 2017 lalu tercatat ada 133.731 pemilih pemula Jakarta Barat yang memiliki hak memilih. Keterlibatan pemilih muda dalam menentukan pilihan politik berdasarkan rekam jejak, visi misi, kredibilitas dan pengalaman kandidat sangat diharapkan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena salah satu indikator sistem demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis yang akan menghasilkan kepala negara yang sah.

Selain partisipasi politik dalam pemilihan umum, pemahaman yang tepat untuk menentukan pilihan politik secara rasional penting dimiliki oleh para pemilih pemula agar dapat mengisi kehidupan berdemokrasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana partisipasi politik dan perilaku pemilih pemula di era reformasi saat ini sebagai acuan untuk mengambil kebijakan dan melakukan pendidikan politik pada tataran pemilih pemula. Adapun alasan penelitian ini dilakukan yang *pertama*, disebabkan oleh keingintahuan peneliti akan partisipasi politik dan perilaku memilih pemilih pemula pada era reformasi saat ini di tengah terpaan informasi tentang situasi politik di Indonesia serta kampanye dari para pasangan calon. Alasan yang *kedua*, adanya kekhawatiran mendasar terhadap kurangnya partisipasi politik secara objektif dari anak muda dalam menentukan pilihan politiknya.

Salah satu contoh pada Pilkada DKI 2017 lalu, banyaknya permasalahan yang timbul sebelum pemilihan kepala daerah berdampak terhadap partisipasi politik masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi pada tahun-tahun politik, kampanye-kampanye politik yang tidak substantif, beberapa aksi damai yang terjadi, *cyber war* serta terpaan informasi yang bersifat hasutan (*hoax*) dan lain

sebagainya secara tidak langsung mempengaruhi partisipasi politik dan perilaku memilih pemilih pemula. Meskipun penelitian tentang pemilih pemula telah banyak dilakukan, namun penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk partisipasi politik serta faktor apa yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya pada Pemilihan Umum. Hal ini menjadi menarik, karena menurut Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) dalam wawancaranya dengan Republika, 17 Februari 2017, karakteristik pemilih muda aktif dan cerdas serta memiliki keterjangkauan informasi mengenai pasangan calon peserta pilkada juga cukup tinggi.

Dilihat dari peranan, angka signifikansi pemilih pemula masih cukup menentukan suara dan arah politik di wilayah DKI Jakarta. Pada awalnya peneliti berasumsi, pilihan politik pemilih pemula belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Namun melihat perkembangannya, peneliti kemudian berasumsi bahwa bisa saja pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu, menurut asumsi awal peneliti kesamaan agama, usia dan etnis juga dapat mempengaruhi perilaku memilih pemilih pemula. Oleh karena itu untuk dapat mengetahuinya secara mendasar, penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti atau pun *stakeholder* untuk melakukan identifikasi serta pemetaan terhadap bentuk partisipasi politik serta perilaku memilih pemilih pemula yang bisa dilanjutkan dengan sosialisasi atau pendidikan politik untuk membentuk generasi muda yang cerdas politik.

Kerangka Teoritis

Pada konteks pemilihan umum, perilaku memilih merupakan suatu tindakan yang bersifat individual, ini disebabkan adanya otoritas penuh kepada individu yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai warga negara untuk menentukan sendiri pilihan politiknya dalam hal ini pemberian suara (*voting*). Perilaku memilih merupakan salah satu bentuk perilaku politik dalam sebuah pemilihan umum. Menurut Mahendra, perilaku memilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu (Mahendra, 2005).

Menurut Jack Plano, perilaku memilih merupakan suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan itu (plano, 1985). Sebelum melihat konsep-konsep lebih jauh mengenai perilaku memilih di Indonesia dapat kita lihat terlebih dahulu beberapa budaya politik memilih yang dikemukakan oleh Pamungkas, bahwa budaya politik memilih di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni (Pamungkas, 2010).

Adanya budaya politik idealis yang melihat pemilu sebagai sarana memperjuangkan idealisme dan garis ideologi. 2. Budaya politik memilih protes, orang kebanyakan menyebutnya sebagai pemilih yang pragmatis dikarenakan pemilih ini ikut pemilu karena ingin mendapatkan sebuah kompensasi atau memasang tarif tertentu atas suara yang mereka inginkan. 3. Budaya politik kompromistik. Pemilih jenis kompromistik ini menganggap bahwa pemberian suara merupakan kewajiban terhadap negara dan secara bersamaan apabila diberikan kompensasi material menganggap bahwa itu tidak jadi persoalan.

Penjelasan lain mengenai perilaku memilih adalah sebagai suatu aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or*

not to vote) di dalam suatu pemilihan umum. Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* dengan sendirinya akan menentukan pilihannya kepada kandidat tertentu (Surbakti, 2010).

Secara garis besar dalam memahami lebih jauh tentang fenomena perilaku memilih (*voting behavior*) maka ada beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam menelusuri lebih jauh tentang perilaku memilih dengan pendekatan sosiologis (*Mazhab Columbia*). Pendekatan ini biasa juga disebut sebagai pendekatan sosial struktural untuk menerangkan perilaku pemilu secara logis dan awalnya dikembangkan oleh mazhab Columbia dan selalu dikaitkan dengan Paul F. Lazarsfeld, yaitu *The Columbia School of Electoral Behavior*.

Lazarsfeld menjelaskan bahwa setiap seorang pemilih hidup dan memiliki karakteristik sosial tertentu seperti: status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaannya, usianya, akan mendefinisikan bahwa lingkaran sosial yang akan mempengaruhi perilaku dan keputusan memilih seseorang karena setiap individu memiliki lingkaran sosial yang mempunyai norma tersendiri, aturan-aturan yang mengatur hidup komunitas mereka. Maka, kontrol atas perilaku individu dengan cara memberikan tekanan maka individu akan menyesuaikan diri tanpa harus bersitegang dengan lingkaran sosialnya (Roth, 2008).

Gerald Pomper memperinci pengaruh pengelompokan sosial tersebut dalam kajian *voting behavior* ke dalam dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih (Roth, 2008). Menurutnya, kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku pemilih. Perilaku-perilaku politik keluarga, apakah perilaku politik ayah atau ibu, berpengaruh terhadap perilaku politik anak anaknya. Perilaku sosial-ekonomi, bisa berupa kelas sosial, agama, tempat tinggal, karakteristik demografis dan

sejenisnya juga berpengaruh terhadap pilihan politik seseorang.

Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan pengaruh memilih seseorang dalam pemilu. Karakteristik sosial yang dimaksudkan adalah seperti, pekerjaan, pendidikan, agama, umur, jenis kelamin, wilayah dan lainnya. Ini dianggap mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi profesi, ataupun kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya. Maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, maupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan suatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

Karakteristik dan pengelompokan sosial yang disebutkan sebelumnya seperti tingkat ketaatan beragama misalnya juga berhubungan erat dengan perilaku para pemilih yang berlatarbelakang Islam santri misalnya, cenderung memilih partai PPP. Di kabupaten-kabupaten tapal kuda di Jawa Timur yang dikenal sebagai basis wilayah santri dari pemilu ke pemilu suara PPP cukup besar (Asfar, 2006).

Pendekatan psikologis sering disebut sebagai pendekatan Michigan (*The Michigan Survey Research Center*). Pendekatan ini menempatkan individu sebagai pusat perhatian. Persepsi dan penilaian pribadi terhadap sang kandidat atau partai politik dan tema-tema yang diangkat (pengaruh jangka pendek) sangat berpengaruh atas pilihan politiknya pada pemilu (Roth, 2008).

Selain itu juga ditegaskan bahwa 'keanggotaan psikologis' dalam partai yang dapat diukur dengan dalam bentuk variabel identifikasi partai yang turut mempengaruhi pilihan politik atau perilaku memilih (pengaruh

jangka panjang). Keputusan individu secara primer tidak ditentukan secara sosial struktural. Pendekatan sosial psikologis berusaha dijelaskan melalui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu dalam jangka waktu pendek.

Hal ini dijelaskan melalui trias determinan yaitu: (1) Identifikasi partai, identifikasi partai dijadikan sebagai variabel untuk mengukur jumlah faktor-faktor predisposisi (pengalaman pribadi atau orientasi politik) yang relevan bagi seorang individu; (2) Orientasi kandidat, serta (3) Orientasi isu atau tema.

Jika faktor-faktor tersebut diumpamakan sebagai suatu aliran yang dituangkan padasebuah corong maka pengidentifikasian partai juga bisa disebut sebagai penyaringan dalam keanggotaan psikologis. Roth menyebutkan bahwa seorang individu tidak selalu seiring dan dikaitkan dengan keanggotaan formil pada sebuah partai karenanya keanggotaan partai secara psikologis juga disebut dengan orientasi partai yang afektif (Roth, 2008).

Campbell mengatakan bahwa identifikasi partai seringkali diwariskan orang tua kepada anaknya seiring dengan pertambahan usia. Identifikasi partai (*Party Identification*) merupakan orientasi yang permanen, yang tidak berubah dari pemilu ke pemilu kecuali seseorang mengalami perubahan pribadi yang besar (menikah, pindah profesi, tempat tinggal dan situasi politik yang sangat luar biasa (krisis ekonomi dan perang) maka identifikasi partai bisa saja berubah. Pendekatan psikologis ini juga membedakan antara kekuatan, arah, intensitas orientasi, baik itu orientasi isu maupun orientasi kandidat. Perilaku memilih individu dapat diubah dengan tema-tema khusus apabila memenuhi tiga persyaratan.

Pertama, tema tersebut dapat ditangkap oleh pemilih. *Kedua*, tema tersebut dianggap penting oleh pemilih. *Ketiga*, harus mampu menggolongkan dirinya baik positif maupun negatif (Roth, 2008). Inti dari pendekatan ini

adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang. Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci dalam menjelaskan sikap dan perilaku memilih. Liddle, Mujani dan Ambardi termasuk yang berpendapat bahwa faktor-faktor psikologis, terutama kepemimpinan dan identifikasi partai memiliki pengaruh yang signifikan dibanding faktor-faktor sosiologis, baik agama, suku bangsa maupun kelas (Mujani & Liddle, 2012).

Antony Downs merupakan orang yang pertama memperkenalkan teori ini, melalui teori ekonominya dan demokrasi, sekaligus orang yang paling konsekuen mengambil jarak dari dasar penjelasan yang telah dicetuskan oleh mazhab *Colombia* (pendekatan sosiologis) dan mazhab *Michigan* (pendekatan psikologis). Menurut Downs pemilih yang rasional adalah hanya menuruti kepentingannya sendiri atau walaupun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingannya sendiri diatas kepentingan orang lain (egois) (Roth, 2008).

Alasan individu mengharuskan mereka bertindak egois ini disebabkan karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan material mereka, yakni pemasukan akan harta benda mereka. Jika ini diterapkan dalam perilaku memilih, maka pemilih akan memilih kandidat atau partai tertentu dengan pertimbangan bahwa lebih menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Pemilih ini mengabaikan konsep politis sebuah partai dan kandidat tapi lebih memperhitungkan keuntungan terbesar jika partai atau kandidat tersebut menduduki sebuah jabatan publik. Pemilih harus memiliki informasi mengenai kegiatan partai atau kandidat mengenai kegiatan partai masa lalu dan setidaknya mengetahui apa yang akan dilakukan di masa mendatang.

Sejalan dengan pendekatan ini pilihan rasional memusatkan perhatian pada perhitungan biaya dan manfaat (*cost-benefit*). Menurut pendekatan *rational choice*, yang menentukan dalam menentukan pilihan memilih adalah bukanlah ketergantungan

terhadap ikatan sosial struktural (*Colombia*) atau ikatan partai yang kuat (identifikasi partai/Michigan). Namun, hasil dari proses penilaian rasional dari individu yang cakap (Roth, 2008). Hal yang lain dijelaskan oleh Elster dalam Mars & Stocker bahwa sebenarnya inti sari dari pilihan rasional (*rational choice*) adalah ketika dihadapkan beberapa jenis tindakan, orang biasanya melakukan apa yang mereka anggap dan yakini sekaligus mempunyai kemungkinan hasil yang terbaik dari pilihan tersebut. Sedangkan Mars dan Stoker mengatakan bahwa pilihan rasional adalah bagian dari perangkat yang sangat diperlukan oleh pakar ilmu politik, karena fenomena penting yang sebagian bisa dijelaskan dengan teori. Tetapi tidak mengklaim bahwa pendekatan pilihan rasional itu berdiri sendiri (Marsh & Stocker, 2010). Almond (1990) mempertegas bahwa ia butuh *perspektif* lain untuk membantu menjelaskan mengapa individu mempunyai kepentingan, bagaimana mereka melihat kepentingan tersebut, kekuasaan, serta peran sosial yang menentukan batas-batas sosial tindakan mereka.

Menurut Herbert Mc Closky (Budiardjo, 2008:183-184), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum (Budiardjo, 2008). Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya dilakukan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yakni kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik

ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan (Budiardjo, 2008).

Secara umum partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi: 1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. 2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. 3. Golongan putih (*golput*) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan (Rahman, 2007).

Menurut Mas'ood dan MacAndrews (2000:225) partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut: *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.

Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini

akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya. *Violance*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan (Mas'oed & Mac Andrew, 2000).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei karena dianggap paling tepat untuk menggambarkan karakteristik populasi yang besar. Lokasi penelitian dilakukan di tiga Sekolah Menengah atas (kelas XII) dan dua universitas di wilayah Jakarta Barat dengan objek penelitian yaitu partisipasi politik dan perilaku pemilih pemula dan subjek penelitian 500 responden.

Teknik penarikan sampel menggunakan *cluster sampling* dengan proporsi jumlah laki-laki dan perempuan 50:50 dengan persentase kelompok agama Islam 70 %, Protestan 16%, Katolik 9%, Budha 5% dan Hindu 0%. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dari hasil olahan data didapatkan dari jawaban pertanyaan kuesioner yang menggunakan skala *likert* untuk mencari pengaruh variabel X1,X2 dan X3 terhadap Y. Penelitian ini juga telah melewati tahapan uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji F, uji T serta uji koefisiensi determinan dengan tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner terhadap pemilih muda usia 17-21 tahun pada saat survei dilaksanakan.

Hasil Penelitian

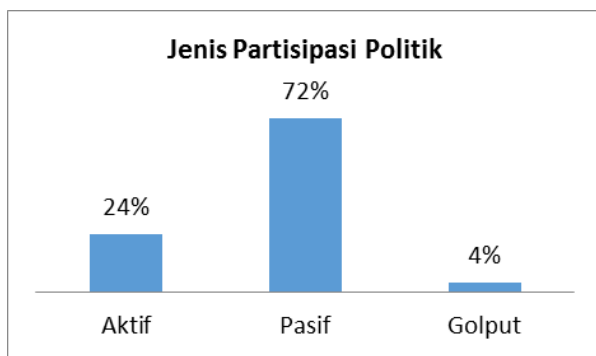
Peneliti mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana jenis dan bentuk partisipasi politik pemilih pemula saat

ini, pada penelitian ini jenis partisipasi politik dibedakan menjadi tiga yaitu: (1) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses *input* dan *output*, (2) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada *output*, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah, (3) Golongan putih (*golput*) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan Berdasarkan hasil penelitian di bawah ini menunjukkan bahwa sebanyak 96% responden menjawab akan menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum 2019, ini menandakan bahwa kesadaran pemilih pemula wilayah Jakarta Barat untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum tergolong tinggi. Namun masih ada 4% responden memutuskan untuk tidak memilih (lihat gambar 1).

Dalam wawancara informal, alasan yang dikemukakan oleh responden yang memutuskan tidak menggunakan hak suara dikarenakan lokasi TPS yang jauh dari tempat tinggal atau tidak adanya kandidat yang sesuai dengan kriteria pilihannya. Dilihat dari jenisnya, sebanyak 24% responden menjawab akan berpartisipasi aktif atau akan menggunakan hak suara serta ikut mengawasi proses pemilihan umum 2019 dari awal sampai akhir (lihat gambar 2). Sedangkan yang akan berpartisipasi pasif atau hanya menggunakan hak suara tanpa terlibat dalam proses politik pada pemilihan umum 2019 sebanyak 72%. Partisipasi politik pasif adalah partisipasi yang berorientasi hanya pada *output*, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah dan sebanyak 4% responden menjawab tidak akan memberikan hak suaranya atau memutuskan untuk *golput*.



Gambar 1. Keputusan Memberikan Suara Pada Pemilihan Umum 2019



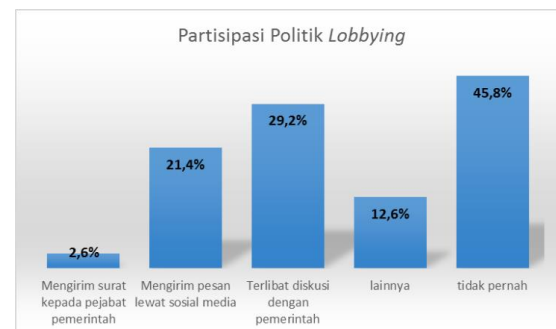
Gambar 2. Jenis Partisipasi Politik 1



Gambar 3. Partisipasi Politik Electoral

Salah satu bentuk partisipasi politik yang berdampak pada hasil suatu proses pemilihan adalah *electoral activity*. Dalam konteks aktivitas pemilihan yang ditunjukkan gambar 3 di atas, dari data diketahui bahwa sebanyak 7 % responden menjawab pernah menjadi relawan kampanye, 33 % menjawab pernah mengajak orang lain untuk memilih salah satu calon Presiden,

sebanyak 28,2 % menjawab pernah ikut serta mengawasi perhitungan suara, dan 8,6 % menjawab lainnya tanpa menjelaskan kegiatannya secara rinci. Sedangkan sisanya, sebanyak 23,2% menjawab tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran berpartisipasi politik dalam bentuk *electoral activity* sebanyak 76,8 % atau dapat dikatakan cukup tinggi. Menariknya, meskipun pada saat survei dilaksanakan responden belum pernah menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum namun mereka sudah melibatkan diri dalam proses pemilihan umum.



Gambar 4. Partisipasi Politik Lobbying

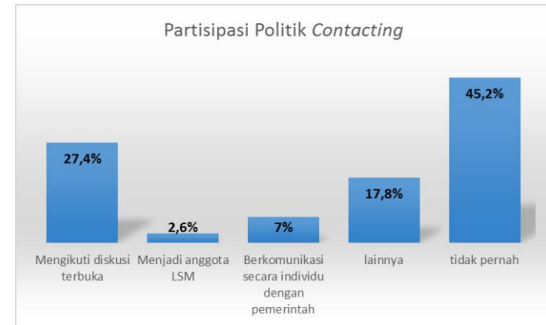
Bentuk partisipasi lain yang diharapkan mampu mempengaruhi dan mengubah kebijakan public untuk dapat lebih berpihak kepada rakyat adalah dengan *lobbying*. Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh gambar 4 di atas, didapatkan data sebanyak 2,6% responden menyatakan pernah mengirimkan surat kepada pemerintah untuk mempengaruhi kebijakannya. 21,4% pernah mengirim pesan lewat sosial media kepada pemerintah, 29,2 % responden menjawab pernah terlibat diskusi langsung dengan pemerintah, 12,6 % menjawab lainnya tanpa menyebutkan alasan secara rinci dan sisanya sebanyak 34,2 % menjawab tidak pernah melakukan partisipasi politik dalam bentuk *lobbying*. Kesimpulannya, sebanyak 65,8% responden menjawab telah berpartisipasi dalam politik dalam bentuk kegiatan lobi kepada pemerintah. Data ini menunjukkan bahwa responden cenderung sudah memiliki

kesadaran untuk berpartisipasi dalam politik sebesar 65,8 % atau cukup tinggi.



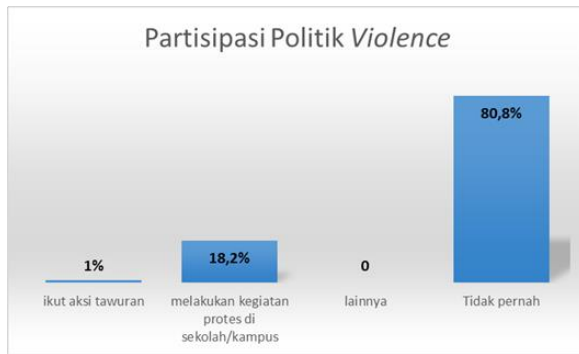
Gambar 5. Partisipasi Politik Organizational Activity

Partisipasi politik *organizational activity* atau keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa ditunjukkan melalui gambar 5. Tingkat keterlibatan dalam organisasi sosial maupun politik telah ditunjukkan dimulai sebelum mereka menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum 2019. Data menunjukkan sebanyak 23,4 % menjawab pernah menjadi ketua organisasi kampus/sekolah, 11,8 % menjawab aktif dalam organisasi kepemudaan, 39,2 % aktif menjadi pengurus organisasi kampus atau sekolah, 8,2 % responden menjawab lainnya dan sebanyak 17,4 % menjawab tidak pernah berpartisipasi dalam organisasi sosial atau politik. Data ini menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki usaha untuk aktif melibatkan diri dalam sebuah organisasi sebagai langkah awal dalam mengisi kehidupan berdemokrasi dan mempengaruhi pemerintah membuat kebijakan. Mayoritas pemilih pemula telah melibatkan diri dalam organisasi sosial atau politik atau dari data ditunjukkan sebesar 82,6 % dan dapat dikategorikan tinggi.



Gambar 6. Partisipasi Politik Contacting

Hasil penelitian pada gambar 6 menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap partisipasi politik dalam bentuk melakukan kontak secara langsung kepada pemerintah baik secara individu maupun kelompok ditunjukkan dengan persentase sebesar 27,4% responden pernah mengikuti diskusi terbuka dengan pemerintah, 2,6 % menjawab tengah menjadi anggota LSM yang secara berkala berkomunikasi dengan pemerintah, 7% menjawab pernah berkomunikasi secara individu dengan pemerintah, 17,8 % menjawab lainnya tanpa menyebutkan bentuk kegiatannya. Sedangkan sebanyak 45,2 % menjawab tidak pernah melakukan kontak dengan pemerintah baik secara individu maupun secara langsung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persentase partisipasi politik dengan bentuk menghubungi pemerintah adalah sebesar 54,8 % atau dapat dikategorikan kurang berpartisipasi. Sehingga perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi politik dalam bentuk kontak dengan pemerintah agar pemilih pemula merasa bahwa dirinya adalah bagian dari proses demokrasi.



Gambar 7. Partisipasi Politik Violence

Salah satu bentuk partisipasi politik yang mungkin dianggap dapat mengubah kebijakan adalah partisipasi politik pemaksaan (*violence*). Pilihan tindakan yang dimaksud dalam partisipasi politik *violence* tidak selalu dimaknai dengan melakukan tindakan pengrusakan, namun sebuah tindakan yang mungkin dianggap dapat mengubah keputusan.

Hasil penelitian pada gambar 7 menunjukkan sebanyak 1% responden menjawab pernah terlibat dalam aksi tawuran, hal ini patut menjadi perhatian meskipun persentasenya sangat rendah. Sebanyak 18,2 % responden lainnya menjawab pernah melakukan tindakan protes di sekolah/kampus, tindakan protes tidak selalu menggunakan cara-cara kekerasan namun dalam hal ini dimaknai dengan potensi melakukan tindakan kekerasan yang akan berdampak pada bentuk partisipasi politik pemilih pemula.

Protes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan menekan pihak lain untuk membuat atau mengubah keputusan. Sisanya, sebanyak 80,8% menyatakan tidak pernah melakukan tindakan protes atau terlibat tawuran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemilih pemula dalam bentuk-bentuk kekerasan cenderung rendah atau sebanyak 19,2 %. Meskipun data menunjukkan persentase bentuk ini rendah tetapi tetap harus menjadi perhatian, karena sebaiknya generasi muda tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengisi kehidupan berdemokrasi.

Selain meneliti jenis dan bentuk partisipasi politik pada pemilih pemula, penelitian ini juga menganalisa bagaimana perilaku pemilih pemula dan faktor apa saja yang mempengaruhi mereka dalam menggunakan hak pilihnya. Asumsi awal, setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi perilaku memilih pemilih pemula dalam menentukan pilihannya yaitu soisologis, psikologis dan pilihan rasional.

Hasil uji validitas terhadap 50 responden dapat dilihat pada tabel 1, analisis uji validitas menunjukkan bahwa semua item yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini memiliki koefisiensi korelasi yang lebih besar dari rtabel.

Tabel 1. Uji validitas

	Rhit ung	Rt ab el	ketera ngan
But	0,58	0,2	
ir 1	8	79	valid
But	0,78	0,2	
ir 2	5	79	valid
But	0,75	0,2	
ir 3	1	79	valid
But	0,66	0,2	
ir 4	7	79	valid
But	0,54	0,2	
ir 5	8	79	valid
But	0,70	0,2	
ir 6	5	79	valid
But	0,81	0,2	
ir 7	5	79	valid
But	0,81	0,2	
ir 8	2	79	valid
But	0,80	0,2	
ir 9	0	79	valid
But	0,84	0,2	
ir10	0	79	valid
But	0,76	0,2	
ir11	1	79	valid
But	0,78	0,2	
ir12	8	79	valid
But	0,62	0,2	
ir13	5	79	valid
But	0,47	0,2	
ir14	2	79	valid
But	0,67	0,2	
ir15	9	79	valid
But	0,73	0,2	
ir16	2	79	valid
But	0,47	0,2	
ir17	7	79	valid
But	0,35	0,2	
ir18	5	79	valid

But ir19	0,56 7	0,2 79	valid
-------------	-----------	-----------	-------

Sumber: data diolah 2018

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2, analisis uji reliabilitas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki reliabilitas yang cukup baik karena nilai *cronbach alpha* >0,60.

Tabel 2. Uji reliabilitas

Variabel	<i>cronbach alpha</i>		Keterangan
X1	0,731	0,60	Reliabel
X2	0,761	0,60	Reliabel
X3	0,654	0,60	Reliabel
Y	0,654	0,60	Reliabel

Sumber: data diolah 2018

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, kuesioner dibagikan kepada 500 responden yang berada di wilayah Jakarta Barat. Hasil pengolahan data dimulai dengan melakukan uji normalitas dan multikolinearitas yang dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

Tabel 3. Rekap hasil uji normalitas dan multikolinearitas.

Variabel	VIF	Keterangan
1		
X1	1,251	Tidak terjadi multikolinearitas
X2	1,280	Tidak terjadi multikolinearitas
X3	1,031	Tidak terjadi multikolinearitas
Sig sample K-S		0,511

Sumber: data diolah 2018

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* menunjukkan nilai sig 0,511 atau lebih dari α 0,5 yang berarti data terdistribusi normal. Sehingga pengolahan data dapat dilanjutkan.

Pada tabel 3 juga terdapat nilai VIF semua variabel bebas X1, X2 dan X3 yang

Untuk uji simultan pada penelitian ini berdasarkan penentuan hipotesis sebagai

keseluruhannya tidak memiliki nilai >5 sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Hasil Analisis Pengaruh Faktor Sosiologis, Psikologis dan Pilihan Rasional terhadap Perilaku Memilih. Penelitian ini telah melewati tahapan pengujian validitas, reliabilitas, uji normalitas dan uji multikolinearitas. Selanjutnya didapatkan hasil uji F, uji T serta uji determinasi koefisiensi. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Rekap hasil analisis linear berganda

Variabel	Koefisiensi Regresi	t hitung	sig
Konstanta	11,702		
X1	0,014	0,461	0,645
X2	-0,050	-1,762	0,075
X3	0,211	5,655	0,000
F hitung= 10,955	Sig= 0,000		
R ² = 0,062			

Sumber: data diolah 2018

berikut: Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa faktor sosiologis,

psikologis dan pilihan rasional secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap perilaku memilih dan Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional secara simultan berpengaruh positif terhadap perilaku memilih. Maka pada tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah sebesar 10,955 atau lebih dari nilai f tabel yaitu 1,16 maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional secara simultan berpengaruh positif terhadap perilaku memilih.

Sedangkan untuk uji parsial pengaruh X_1, X_2 dan X_3 terhadap Y adalah sebagai berikut hasilnya adalah: Secara parsial, faktor yang berpengaruh terhadap perilaku memilih pemilih

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: (1) Partisipasi politik pemilih pemula wilayah Jakarta Barat dapat dikatakan cukup tinggi. Dilihat dari keputusan untuk memberikan hak suaranya pada pemilu 2019 yaitu sebesar 96% dengan partisipasi politik pasif sebesar 72%, partisipasi politik aktif sebesar 24%;

(2) Dilihat dari bentuknya, terdapat 5 bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula yaitu aktivitas pemilihan (*electoral activity*) 76,8%, melakukan lobi kepada pemerintah (*lobbying*) 65,8%, aktivitas organisasi (*organizational activity*) 82,6%, kontak kepada pemerintah (*contacting*) 54,8% serta pemaksaan (*violence*) 19,2%;

(3) Partisipasi politik pemilih pemula Jakarta Barat didominasi dengan keterlibatan dalam organisasi sosial atau politik (*organizational activity*). Meskipun partisipasi politik *violence* atau menggunakan cara-cara kekerasan memiliki persentase rendah yaitu sebesar 19,2 %, namun patut menjadi perhatian pemerintah untuk lebih meminimalisir hal ini;

(4) Terdapat tiga faktor yang dianggap mempengaruhi perilaku memilih pada penelitian ini yaitu faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosiologi (X_1), psikologis (X_3) dan pilihan

pemula adalah pilihan rasional dengan nilai t hitung 5,655 atau $> t$ tabel dan nilai sig 0,000 atau $< 0,05$, sedangkan faktor sosiologis dengan nilai t hitung 0,461 dan nilai sig 0,065 dan psikologis dengan nilai t hitung -1,762 dan nilai sig 0,075 tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih pemilih pemula.

Berdasarkan tabel 4 pula diperoleh nilai koefisiensi determinasi (*r square*) yang dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yaitu sebesar 0,062 sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap Y adalah 6,2% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kesimpulan

rasional (X_4) secara simultan berpengaruh positif terhadap perilaku memilih (Y) pemilih pemula Jakarta Barat;

(5) Secara parsial, faktor yang mempengaruhi perilaku memilih pemilih pemula Jakarta Barat adalah pilihan rasional dengan nilai signifikansi 0,000, sedangkan faktor sosiologis dan psikologis tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih pemilih pemula di wilayah Jakarta Barat dengan nilai signifikansi berturut-turut 0,065 dan 0,075;

(6) Dalam penelitian ini, faktor pilihan rasional merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi perilaku memilih pemilih pemula Jakarta Barat. Sehingga dapat dimaknai bahwa pemilih pemula Jakarta Barat cenderung merupakan pemilih yang rasional.

Keenam kesimpulan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan atau pendidikan politik untuk pemilih pemula di wilayah Jakarta Barat dengan mengarahkan kepada bentuk-bentuk partisipasi politik aktif dan melibatkan diri dalam mengawasi proses politik menjelang pemilihan umum 2019. Pengaruh pilihan rasional pemilih pemula perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi politik yang sehat dan cerdas untuk dapat mengarahkan pemilih pemula memberikan

suara kepada calon yang cakap dan memberikan hasil terbaik bagi bangsa.

Daftar Pustaka

- AA. Oka Mahendra, 2005. *Pilkada di tengah Konflik Horisontal: Nurmahmudi Ismail Unggul di KPUD, Badul Kamal Menang di Pengadilan Tinggi*, Jakarta: Millenium Publisher.
- Almond, Gabriel dan Sydney Verba. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik, dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Edisi Revisi. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2016. Edisi Revisi. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kriyantono, Rahmat. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Marsh, David & Stoker, Gerry. 2010. *Theory and Methodes in Political Science*. Bandung: Nusa Media.
- Mas'ood, Mochtar dan Mac Andrews. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat; Islam, budaya demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mujani, Saiful. William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika
- Pamungkas, Sigit. 2010. *Pemilu, Perilaku Memilih, & Kepartaian*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.
- Plano, Jack C. Dkk, 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahman H, A 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Roth, Dieter. 2008. *Studi Pemilu Empiris, sumber teori-teori, dan metode*. Jakarta: Friedrich-Naumann Stiftung Fur Die Freiheit.
- Suliyanto. 2005. *Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.